

Rabu, 12 Oktober 2011



AGUS MULYANA.

FOTO: DOK

Putussibau, BERKAT.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan untuk mengabaikan semua bentuk pro-

Proposal Tanpa SPJ Harus Diabaikan

posal yang tidak disertai dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang jelas atas penggunaan dana proposal yang diajukan tersebut.

“Instruksi ini juga sudah saya sampaikan hingga ke masyarakat kecamatan ketika saya kunjungan kerja,” terang wabup ketika membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan penatausahaan aset bagi pengurus dan penyimpanan barang di kabupaten Kapuas Hulu, Senin (10/10), di gedung Korpri, Putussibau.

Wabup mengatakan terobosan ini dilakukan dalam rangka mendukung ko-

mitmen pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka tertibnya pencatatan, administrasi karena hal ini tentunya sangat berpengaruh negatif maupun positif atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu.

“Tekat terus memperbaiki laporan keuangan daerah ini tidak hanya berasal dari tekat dan niat dari bupati dan wakil bupati saja, tapi harus menjadi tekat dan niat dari seluruh aparat pemerintah dan masyarakat Kapuas Hulu sendiri,” tegas

wabup.

Wabup kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu agar tahun 2011 ini bisa mencapai predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

“Untuk mencapai predikat tersebut, maka pemerintah kabupaten Kapuas Hulu harus menertibkan semua administrasi keuangan. Semua uang yang masuk dan uang yang keluar, harus jelas, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuklah penertiban proposal-proposal,” kata wabup. *(her)*